

KR RADIO
107.2 FM

Sabtu, 27 November 2021

05.00	Bening Hati	14.00	Radio Action
05.30	Pagi-pagi Campursari	16.00	Pariwara Sore
06.45	Lintas Liputan Pagi	16.10	KR Relax
07.00	Nuansa Gita	17.00	Manca Spesial
09.00	Pariwara Pagi	19.00	Lintas Liputan Malam
09.10	Teras Dangdut	19.15	Digoda
11.00	Family Radio	21.00	Berita NHK
		22.00	Lesehan Campur Sari

Grafik: Arlo

PALANG MERAH INDONESIA
UNIT DONOR DARAH

Stok Darah

	A	B	O	AB
PMI Yogyakarta (0274) 372176	43	41	53	41
PMI Sleman (0274) 869909	98	90	142	40
PMI Bantul (0274) 2810022	5	5	5	3
PMI Kulonprogo (0274) 773244	5	37	12	7
PMI Gunungkidul (0274) 394500	30	12	9	4

Sumber: PMI DIY. (Stok darah bisa berubah sewaktu-waktu). (APW/ Arlo)

CAPAIAN VAKSIN DIY TINGGI, JANGAN LENGAH

Masyarakat Mulai Abai Prokes

YOGYA (KR) - Kasus terkonfirmasi positif di DIY pada Kamis (25/11) menjadi yang tertinggi di Indonesia, dengan 79 kasus. Disusul DKI Jakarta dengan 54 kasus dan Jawa Tengah dengan 45 kasus.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta mengaku prihatin dengan kondisi ini. Meskipun angkanya di bawah 100, tetap saja harus diwaspadai. Apalagi sejumlah fasilitas publik di DIY saat ini juga mulai ramai.

"Ini harus waspada, protokol kesehatan harus terus sangat ketat. Tidak boleh kita sembarangan lagi. Apalagi kita lihat Yogyakarta akhir-akhir ini sudah sangat ramai. Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Sekarang kita tertinggi di Indonesia, maka kita tetap harus jaga prokes dengan ketat," katanya, Jumat (26/11).

Meski saat ini hampir seluruh wilayah DIY Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2, namun di lapangan justru terkesan tidak ada nuansa PPKM. Mengenai apakah akan ada batasan-batasan lagi, masih terus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Mengingat level PPKM juga yang menentukan adalah pusat.

Jika saat PPKM level 3 nanti harus ada pembatasan-pembatasan, Huda yakin jika yang daerah akan mengikuti kebijakannya. Tetapi sekarang ini, bagaimana harus tetap taat dengan protokol kesehatan. Seberapa level PPKM itu.

"Jangan sampai ada lonjakan lagi. Apalagi kalau sampai ada varian baru,

itu sangat kita khawatirkan. Meskipun saat ini fasilitas kesehatan kita sudah sangat siap. Termasuk capaian vaksinasi juga sudah tinggi, namun jangan membuat kita menjadi lengah," ungkapnya.

Meski demikian, yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana upaya pencegahan. Bukan bagaimana memakai fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah tersedia tersebut. "Jika sampai kasusnya tinggi, otomatis ekonomi kita akan drop lagi," tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto juga terus mengingatkan kepada masyarakat agar jangan lengah dengan situasi saat ini. Terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Karena menurutnya, upaya memotong mata rantai penyebaran penyakit menular harus dengan pencegahan itu lebih baik dibanding upaya kuratif.

"Apalagi semua pihak sudah paham bagaimana Covid-19 dapat menular dan upaya pencegahannya. Pemahaman ini harus terus dimiliki masyarakat. Termasuk ketika sedang beraktivitas di tempat umum," jelasnya.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, sebagai langkah antisipasi peningkatan mobilitas pada libur na-

tal dan tahun baru atau Nataru, telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No 62/2021. Aturan tersebut terbit pada Senin (22/11) lalu dan mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 di seluruh wilayah Indonesia.

"Ini sekaligus sebagai upaya mencegah dan menanggulangi penularan Covid-19 saat libur Nataru. Keselamatan dan kesehatan masyarakat jadi prioritas utama," tandas

Menkominfo, Kamis (25/11).

Dikatakan Johnny, masyarakat diminta mematuhi kebijakan ini dan tidak lengah, karena kelengahan sekecil apapun bisa menyebabkan peningkatan kasus Covid-19.

Johnny menjelaskan, secara garis besar, pengaturan aktivitas masyarakat dalam Inmendagri ini sama seperti aturan penerapan PPKM level 3. Namun, dengan beberapa aturan khusus ditambahkan untuk mengantisipasi

Nataru. Seperti imbauan untuk tidak bepergian/pulang kampung. Penguatan prokes di gereja, pusat perbelanjaan dan tempat wisata dengan aturan PPKM level 3, larangan cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN dan karyawan swasta selama libur Nataru. Kemudian peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga pada 24 Desember 2021 - 2 Januari 2022. Juga penutupan semua alun-alun daerah pada 31 Desember 2021 - 1 Januari 2022.

(Awh/Ret)-f

CEGAH GAGAL PANEN SAAT PENGHUJAN Petani Perlu Cermat Pilih Tanaman

YOGYA (KR) - Kenaikan intensitas hujan yang cukup tinggi dan adanya pengaruh La Nina membutuhkan perhatian serius dari para petani. Tindakan itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerugian atau gagal panen. Adapun bentuk dari antisipasi itu bisa dilakukan dengan lebih cermat dalam memilih tanaman serta menjaga sanitasi lahan dan membersihkan tanaman.

"Peningkatan intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir memiliki dampak positif dan negatif, untuk itu petani dituntut lebih cermat. Dampak positifnya karena ketersediaan air sebagai pembentuk tubuh tanaman dapat terpenuhi sehingga tanaman bisa berkembang dengan baik. Adapun dampak negatifnya karena curah hujan yang tinggi dan terus menerus berpengaruh pada pertumbuhan tanaman karena hama dan penyakit menjadi tinggi," kata pengamat pertanian dari Akademi Pertanian (Apta) Yogyakarta, Ir Supriyati MP di Yogyakarta, Jumat (26/11).

Supriyati menyatakan, dampak dari adanya La Nina perlu menjadi perhatian bersama karena bisa mengancam ketahanan pangan Indonesia, terutama sektor pertanian dan perikanan. Dengan hama dan penyakit yang tinggi mengancam kualitas hasil tanaman maupun kuantitasnya. Sedangkan sektor perikanan nelayan tidak berani melaut karena kondisi ombak yang tinggi, sehingga menyulitkan para nelayan.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi lebih dini terutama di bidang pertanian perlu pengelolaan tanaman yang lebih baik. Termasuk dalam memilih tanaman yang cocok dan tidak berisiko tinggi serta mengatur pola tanam. Misalnya di daerah yang cocok untuk tanaman padi bisa diperluas di wilayah yang beririgasi, sawah tadah hujan maupun ladang di luar Jawa.

(Ria)-f

BERIKAN LAYANAN TERBAIK BAGI WISATAWAN Dispar Gelar Bimtek UJP Angkutan Wisata



KR - Istimewa

Para narasumber pada bimbingan teknis usaha jasa pariwisata (UJP) angkutan wisata di Cavinton Hotel.

YOGYA (KR) - Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan bimbingan teknis Usaha Jasa Pariwisata (UJP) angkutan wisata di Cavinton Hotel Yogyakarta, Kamis (25/11). Acara tersebut diikuti pengusaha angkutan wisata di DIY. Di antaranya Velocity Transport, Alfa Trans, Bimo, Bintang Lima Rent Car, Jeep Wisata Gunungkidul dan angkutan wisata lainnya. Para pengusaha dibekali pemahaman peraturan baru di masa pandemi agar mereka dapat beradaptasi dengan pembebanan pelayanan lebih baik

kepada wisatawan. Acara dibuka Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo SH MED.

Singgih mengungkapkan kondisi pariwisata DIY kini mulai ramai. Hotel maupun jalan sudah terlihat transportasi umum seperti bus pariwisata. Singgih yakin, upaya yang selama ini diadakan seperti SOP, bimbingan teknik usaha jasa pariwisata, bantuan sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan di destinasi wisata dan adanya bantuan hibah Gubernur se-DIY

untuk reaktivasi kembali destinasi wisata, akan membuahkan hasil. "Melalui bimtek ini kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan," tegas Singgih. "Ada beberapa hal yang harus disesuaikan di masa pandemi dan juga menyesuaikan peraturan yang bersifat dinamis. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat beradaptasi dengan perubahan peraturan yang berbasis risiko atau OSS berbasis risiko, agar ke depan pelayanan lebih baik lagi," paparnya.

Narasumber Novian Chrisnando SIP dari DPPM DIY mengajak para pengusaha angkutan wisata di DIY melengkapi perizinan usaha yang dikelolanya. Menurut Nando, perizinan berusaha sangat penting karena bermanfaat untuk operasional ke depannya.

Sumariyoto SE MSi dari Dinas Perhubungan DIY menjelaskan mengenai Permenhub tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek dan implementasinya.

(Sal)-f

PANGGUNG



KR - Istimewa

Fannita Posumah dan Kayana Allica.

Fannita Ingin Lagu Anak Sukses Lagi

TOP 5 Putri Pariwisata Indonesia 2020, Fannita Posumah sangat berharap lagu anak-anak bisa bangkit dan sukses lagi. Selain itu genre musik ini juga perlu memiliki misi mendidik sekaligus menghibur.

Guna mewujudkan impiannya maka Fannita menggandeng penyanyi cilik Kayana Allica untuk berkolaborasi, dan belum lama ini telah merilis lagu 'The Highest Star' (Menggapai Bintang).

Fannita merasa yakin lagu yang dinyanyikan bisa menuai perhatian pendengar musik Indonesia. Selain

itu, berkolaborasi dengan anak-anak adalah salah satu kepuasan tersendiri. "Seru banget, dasarnya aku emang suka sama anak-anak, jadi, enggak ada kesulitan saat rekaman," ujar Fannita.

Wanita kelahiran 25 Januari 1998 ini mengawali kariernya sebagai Putri Pariwisata 2020. Setelah itu, Fannita mulai melebarkan sayapnya dan menggeluti dunia tarik suara dan peran. Terbukti, kariernya sukses dan berhasil menarik perhatian publik.

Fannita menjelma sebagai bin-

tang lewat sinetron serta web seriesnya. Ia mengaku sudah lama bisa bernyanyi dan akhirnya bisa merilis lagu rohani.

"Aku nyanyi sebenarnya udah cukup lama. Seriusnya tuh pas 2016, aku dipanggil om aku Rudy Loho untuk nyanyi lagu rohani. Berjalannya waktu aku bertemu RCT Family trus dibikinin lagu. Setelah itu, ketemu Kak Tata Liem dan serius di akting," kata Fannita.

Fannita merupakan wanita muda asal Sulawesi Utara yang berha-

sil meraih berbagai penghargaan. Mengawali karier sebagai model, ia sukses menjadi Putri Pariwisata 2020. Tak hanya itu saja, ia juga sempat meraih penghargaan sebagai Mahkota Putri Minahasa Tenggara 2015.

Sukses berkarier sebagai model, rupanya tak membuat wanita 23 tahun ini merasa cepat puas. Fannita kerap membintangi beberapa sinetron dan web series lainnya. Salah satu sinetron yang dimainkannya yakni 'Catatan Harian Seorang Istri'.

(Cdr)-f

DPRD KABUPATEN KLATEN

DPRD SEPAKAT 2022 FOKUS PADA PEMULIHAN EKONOMI



Hamenang Wajar Ismoyo.

Dalam fungsi pembahasan anggaran, kini DPRD Kabupaten Klaten sedang menggogol Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten 2022. Pembahasan dilakukan secara marathon, dan diharapkan segera bisa ditetapkan menjadi APBD pada akhir Desember 2021.

Eksesutif telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022 tersebut dalam rapat paripurna DPRD Klaten di Gedung DPRD Klaten, Senin malam, 22 November 2021. Selanjutnya sudah ditindaklanjuti DPRD dengan rapat paripurna pemandangan umum fraksi, jawaban

bupati dan tahapan pembahasan lainnya.

Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo mengemukakan, RAPBD 2022, intinya masih fokus untuk penanganan masa pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Menurut Ketua DPRD, dalam rangka pemulihan ekonomi, banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan eksekutif, namun demikian harus tetap on the track. Selain meningkatkan ekonomi, infrastruktur juga harus dijaga angka-angkanya. Yakni anggaran perbaikan infrastruktur juga harus tetap ada, karena lalulintas di Klaten sangat padat, sehingga jalan dan jembatan rawan rusak. "Selain pemulihan ekonomi, untuk infrastruktur juga harus kita jaga anggarannya," kata Hamenang.

Pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2022 mencakup 6 prioritas. Yakni peningkatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur, Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Hariyanto. Menurut

Hariyanto, APBD 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. karena adanya pandemi Corona yang berpengaruh besar sekali terhadap semua sektor. Selain itu PAD juga mengalami penurunan. Dengan adanya penurunan APBD otomatis mengurangi sejumlah kegiatan.

"Tahun 2022 ini kebijakan untuk memulihkan ekonomi, karena dampak pandemi kan juga pada ekonomi. Sebelumnya APBD kan Rp 2,7 triliun, sekarang hanya sekitar 2,45 triliun," kata Hariyanto.

Para pimpinan DPRD tersebut menegaskan, karena sekarang masih masa pandemi, harus dipastikan bahwa anggaran untuk kesehatan tercukupi. Sedangkan untuk membangkitkan perekonomian juga harus didukung. Misalnya dengan membantu pembangunan infrastruktur desa melalui program padat karya. Dengan cara ini, infrastruktur desa akan menjadi bagus, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, sehingga perekonomian desa meningkat.

"Semua fraksi sepakat 2022 untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Bantuan ekonomi tak hanya bantuan ke UMKM, melainkan bisa juga bantuan infrastruktur tetapi harus padat karya, melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Kalau terlalu fokus



Para pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dalam sidang paripurna

pada kesehatan dan ekonomi, tapi infrastruktur jelek jadi masalah juga. Tahun 2021 pembangunan infrastruktur skala besar belum bisa. Tahun 2022 ada tetapi juga tidak sebesar sebelum pandemi. Minimal kita sudah bisa menganggarkan padat karya," jelas Ketua DPRD.

Menurut Hamenang, sebenarnya DPRD mengharapkan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki kontribusi tinggi. Kenyataannya trend PAD turun karena pandemi.

Sektor-sektor yang biasanya diandalkan sebagai pendapatan kini tidak bisa dimaksimalkan. Antara lain restruksi usaha, pasar, parkir, dan sektor tambang.

"Sekarang ekonomi baru mulai menggeliat, jika ternyata Januari nanti perekonomian tumbuh luar biasa, semoga realisasi PAD bisa lebih baik lagi. Sebenarnya bisa genjot PAD, tetapi kalau sektor-sektornya itu berkaitan restruksi dari masyarakat ya kita ga bisa, rasanya ga tega," tambah Hamenang.

DPRD juga mengingatkan pada eksekutif agar tidak tumpang tindih dalam menganggarkan penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi.

"Bicara pandemi ini, semuanya terdampak, kemudian semua sektor berusaha menganggarkan. Ini jangan sampai tumpang tindih. Kita harus menghindari double anggaran, agar semakin banyak warga yang tercover bantuan tersebut. Memang awal pandemi itu kan kacau data dari pusat belum rapi, sekarang sudah membaik," jelas Ketua DPRD.

Tulisan dan foto-foto : Sri Warsiti